

Politik Representasi Muslimat dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Sismonika Puspitasari¹, Sulton², Ambiro Puji Asmaroini³

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, Indonesia

sismonikapuspitasari@gmail.com¹, sulton@umpo.ac.id², ambirop@umpo.ac.id³

ABSTRACT

Pilkada This research contains the political representation of NU Muslimat by involving themselves in various lines and roles at the momentum of the 2020 Pilkada in Ponorogo. The purpose of this study was to determine the form of Muslimat struggle for their political representation in simultaneous regional elections in 2020 and to determine the ability of Muslimat political control over the simultaneous regional elections in 2020. The method used in this study was descriptive qualitative with interview and documentation data collection techniques, analysis. The data uses the Miles and Huberman model, namely reduction, display data, and conclusion data. The results of research related to representation politics explain the involvement of Muslimat with pairs of candidates, as well as organizing institutions in the 2020 Ponorogo Regency Simultaneous Elections. The form of Muslim political representation in the 2020 simultaneous elections can be seen 2 indicators, namely political interaction and communication among Muslimat members who participate in organizing programs that are carried out with the candidate for regent and supervisory agencies. For example, providing space for muslimat members to be involved in becoming a team for winning candidate pairs, witnesses, KPPS officers, and supervisors in the Pilkada process. Muslimat also participates in controlling the Pilkada from the beginning to the end (determination of winners). By looking for information through digital media and its members who play a role as a success team, KPPS officers, supervisors, and witnesses.

Keywords: Muslimat NU, Simultaneous Election 2020, Representation Political

ABSTRAK

Penelitian ini berisi tentang politik representasi Muslimat NU dengan cara melibatkan diri dalam berbagai lini dan peranan pada momentum Pilkada 2020 di Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk perjuangan Muslimat atas keterwakilan politik mereka serta mengetahui kemampuan kontrol politik Muslimat terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan model Miles and Huberman yakni reduction, data display, dan data conclusion. Hasil dari penelitian terkait politik representasi menjelaskan adanya keterlibatan Muslimat dengan pasangan calon, serta lembaga penyelenggara dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. Bentuk keterwakilan politik muslimat dalam Pilkada serentak tahun 2020 dapat dilihat dengan 2 indikator yaitu interaksi dan komunikasi politik serta keterlibatan Muslimat dalam Pilkada Serentak 2020. Hal ini terbukti adanya bentuk interaksi dan komunikasi anggota Muslimat yang berpartisipasi menyelenggarakan program-program yang dilakukan bersama pasangan calon bupati dan lembaga pengawas. Seperti, memberi ruang kepada anggota Muslimat untuk terlibat menjadi tim sukses/tim pemenang pasangan calon, saksi, petugas KPPS, serta pengawas dalam proses Pilkada. Muslimat juga ikut serta mengontrol jalannya Pilkada mulai dari awal hingga akhir (penetapan pemenang). Dengan cara mencari informasi melalui media digital maupun para anggotanya yang berperan menjadi tim sukses, petugas KPPS, pengawas, dan saksi.

Kata Kunci: Muslimat NU, Pilkada Serentak 2020, Politik Representasi

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah syarat mutlak bagi negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, karena pemilu merupakan salah satu hak asasi warganegara yang prinsipil. Dalam pengertian demikian pemilihan umum menjadi suatu keharusan bahkan kewajiban bagi suatu negara yang hendak mewujudkan ide kedaulatan rakyatnya termasuk dalam memilih pemimpin (Sulton, 2015). Demikian halnya dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, sebagai salah satu bentuk demokrasi prosedural dalam memilih pemimpin di tingkat local, tolok ukur suksesnya adalah kebebasan warga negara dalam memenuhi hak-hak politiknya. Termasuk dalam hal ini diantaranya kebebasan memilih dan memberikan suara dalam pemilihan untuk memilih seorang pemimpin yang diinginkan masyarakat (Adhim, 2018).

Untuk penguatan proses pendalaman demokrasi, penyelenggaraan pilkada diharapkan tidak hanya terbatas pada procedural memilih pemimpin tetapi lebih dari itu juga merupakan proses politik substantif, dimana negara melindungi masyarakatnya dalam mempresentasikan hak-haknya (Dewa et al., 2020). Dengan

demokrasi substantif, negara dituntut untuk memperhatikan dan mengutamakan masyarakatnya untuk mendapatkan hak-haknya baik untuk mendapatkan kesejahteraan maupun keadilan. Artinya negara harus memberikan kebebasan pada masyarakat tanpa memandang perbedaan gender, golongan, agama, organisasi atau yang lainnya.

Pada tahun 2020 lalu, sebanyak 270 daerah di Indonesia melaksanakan Pilkada serentak untuk memilih para pemimpinnya. Idealnya pilkada tidak hanya sebatas menjadi ajang kontetasi dalam memilih pemimpin local, tetapi juga memberikan ruang kebebasan yang sama pada warga untuk berpartisipasi. Artinya pilkada diharapkan memberi akses yang sama bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara luas dalam menentukan pemimpin pilihannya (Akbar, 2016). Dalam pengertian demikian pilkada dapat konstruksi sebagai upaya untuk menciptakan *local accountability, political equity dan local responsiveness*. Benarkah pilkada telah memberikan ruang yang setara bagi kelompok dan golongan termasuk perempuan dalam memperjuangkan aspirasinya ? Adalah salah satu dari banyak pertanyaan sekitar pilkada yang tidak mudah untuk dijawab. Faktanya bagi kalangan

tertentu, seperti halnya keberadaan perempuan tidak mudah untuk dapat berkontribusi dalam dunia politik. Banyaknya rintangan dan bentuk ketidakadilan serta kesetaraan yang masih dijumpai di Indonesia (Nimrah & Sakaria, 2015). Maka penting untuk melihat bagaimana perjuangan kaum perempuan atas keterwakilan dan kepentingan politiknya.

Membicarakan perjuangan perempuan, Muslimat NU memiliki kontribusi dalam menyoal tegaknya budaya patriarki atau stigma yang mengatakan kaum laki-laki selalu nomor satu dan dominan. Muslimat hadir ditengah masyarakat untuk menghapus perbedaan gender menuju kesetaraan gender, dimana perempuan dapat memiliki control dan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk di bidang politik. Peran Muslimat dalam kemajuan perempuan di Indonesia tersebar dalam berbagai bidang diantaranya kesehatan, social, ekonomi, pendidikan serta politik. Partisipasi politik Muslimat telah mampu menunjukkan perannya sebagai kaum yang tidak terpinggirkan dari kehidupan politiknya (Zainal, 2018). Sebagai organisasi perempuan dengan jumlah anggota yang besar, Muslimat tentu menjadi entitas yang menarik bagi penyelenggara maupun peserta pilkada serentak tahun 2020.

Sejumlah riset terdahulu yang mengkaji perjuangan politik kaum perempuan telah dilakukan, seperti : Muzaeni (2018) tentang mobilisasi politik; Muwahidah (2019) tentang representasi politik perempuan di legislatif; dan Fitriana (2020) tentang perjuangan perempuan atas identitas kewargaan. Dengan menggunakan konsepsi teori politik kewargaan, terutama politik representasi yang ditawarkan oleh Stokke dan Hiariej (2018), riset dilakukan untuk melihat perjuangan politik Muslimat dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Sebagai organisasi perempuan modern dengan jumlah massa yang besar, tentu keberadaan Muslimat menarik bagi penyelenggara (KPU maupun Bawaslu) untuk dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak. Sementara bagi peserta pilkada, Muslimat adalah lumbung suara yang diharapkan memberikan dukungan penuh pada mereka. Pada pihak lain, Muslimat juga memiliki agenda dan aspirasi yang harus diperjuangkan dan dikomunikasi kepada para calon agar ke depannya menjadi bagian dari program mereka apabila terpilih.

Relasi antara kepentingan penyelenggara dan peserta pilkada dengan kepentingan Muslimat ini menarik untuk diungkap, terutama dari sisi kepentingan

Muslimat sebagai salah satu organisasi perempuan dalam menghadapi stigma dominasi laki-laki dalam dunia politik. Bagaimana perjuangan Muslimat atas keterwakilan politik mereka dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 ? dan bagaimana kemampuan control politik Muslimat terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 ? adalah dua pertanyaan yang hendak diungkap dalam penelitian ini. Inilah latar belakang dilakukannya penelitian dengan judul “Politik Representasi Muslimat dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020”.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau narasumber dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di organisasi Muslimat, sebanyak 3 orang yang terlibat dalam wawancara ini antara lain Ketua PC Muslimat Kecamatan Sawoo, Bendahara Pimpinan Ranting Desa Kemuning serta Bendahara Pimpinan Ranting Kelurahan Mangkujayan. Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci dan peneliti harus berbekal pada teori-teori yang luas sehingga dapat menjadi *human instrumen* yang baik. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan model Miles and Huberman, yakni analisis data dilakukan menggunakan tahapan data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion* (Sugiyono, 2012). Kemudian data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Muslimat

Muslimat NU merupakan salah satu badan otonom Nahdatul Ulama (NU) perempuan yang bergerak dalam bidang social kemasyarakatan. Organisasi ini mulai digagas dalam muktamar NU Surabaya tahun 1940 dan setelah melakukan perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 29 Maret 1946 / 26 Rabiul Akhir gerakan perempuan Muslimat diterima dan disahkan dalam acara Muktamar NU di Purwokerto (Syukriyah, 2016). Fokus organisasi ini adalah eksistensi dan aktivitas perempuan. Tujuan didirikannya organisasi Muslimat adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan di Indonesia, dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, social, keagamaan dan kesehatan (Qibtiyah, 2017). Dalam hal ini gerakan Muslimat dengan bebas dapat memperjuangkan hak-hak kaum perempuan

maupun kepentingan nasional lainnya secara mandiri karena Muslimat merupakan badan otonom yang bisa mengatur rumah tangganya sendiri.

Saat ini anggota Muslimat NU di Indonesia mencapai sekitar 32 juta yang tersebar di 33 provinsi, terdapat 354 cabang pimpinan cabang ditingkat kabupaten/kota, 5.222 Pimpinan Anak Cabang Tingkat Kecamatan, dan 36.000 Pimpinan Ranting Tingkat Kelurahan / Desa. Dengan jumlah anggota yang besar dan tersebar di seluruh penjuru nusantara. Tidak diragukan lagi, Muslimat NU telah menjadi organisasi besar yang dikenal di berbagai penjuru.

Keberadaan organisasi Muslimat NU di Ponorogo, sebagaimana di kota-kota lain dijadikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan membentuk perempuan-perempuan untuk bergerak dan eksis dalam bersosial, berpikiran maju dan kritis. Muslimat NU bergerak dalam berbagai bidang antara lain, social, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta politik. Melalui pelaksanaan program-programnya Muslimat di Ponorogo akan tetap menjaga eksistensinya sebagai organisasi perempuan besar yang dapat mewujudkan kesejahteraan social yang berkesetaraan dan berkeadilan serta mendapat porsi yang sama dengan laki-laki

dalam pengambilan keputusan. (Wawancara Ketua PAC Muslimat Sawoo, 4 Agustus 2021).

Melalui devisi Hukum dan Advokasi, Muslimat NU berusaha untuk mewujudkan keadilan hukum, terpenuhinya hak-hak politik perempuan, serta terlaksananya perlindungan perempuan sebagai warga negara. Berbagai program digelar diantaranya berupa pendidikan politik untuk anggota yang dilakukan melalui acara seminar, sosialisasi, serta perkumpulan rutin. Keberadaan organisasi Muslimat pada gilirannya berfungsi menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat dalam memperjuangkan menyamakan kesetaraan, pengakuan, kesejahteraan serta perjuangan untuk politik keterwakilan.

B. Politik Keterwakilan Muslimat dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Pilkada Kabupaten Ponorogo 2020 merupakan ajang pemilihan kepala daerah serentak dilakukan secara langsung dan diselenggarakan oleh KPU, dalam hal ini diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Ponorogo. Pilkada serentak ini diikuti oleh 2 pasang calon bupati dan wakil bupati yakni pasangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita dengan partai pendukung PDIP, PAN, PPP dan

Hanura serta pasangan Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono dengan partai pendukung NasDem, PKB, Golkar, Demokrat, Gerindra dan PKS.

Kajian tentang politik perwakilan Muslimat pada Pilkada Serentak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 ini dijelaskan menggunakan kerangka analisis Hiariej dan Kristian Stokke 2018 yang sudah dijelaskan dalam latar belakang. Dalam kaitan ini pembahasan keterwakilan politik Muslimat akan dilihat dari dua indikator yaitu keterwakilan politik dan control politik Muslimat dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. Esensi dari pembahasan pada sub bab ini adalah tentang keterwakilan politik serta control politik Muslimat NU terkait dengan kemampuan perempuan dalam ikut serta mensukseskan Pilkada.

1. Keterwakilan Politik Muslimat

Keterwakilan politik atau politik representasi merupakan bentuk perjuangan kelompok/golongan untu dapat menyampaikan ide, kepentingan, aspirasi melalui keterwakilannya (Hiariej, 2018). Terkait dengan hal ini, Fraser 2009 mengusulkan sebuah konsep dimensi keadilan dengan menambahkan *misrepresentasi* yang menjadi bentuk utama dari keadilan politik dan politik representasi

sebagai model dari perjuangan keadilan. Upaya Muslimat dalam memperjuangkan keterwakilan politik pada Pilkada serentak tahun 2020 dapat dilihat dengan 2 sudut pandang yaitu;

Pertama, interaksi dan komunikasi politik Muslimat. Dalam proses berdemokrasi interaksi dan komunikasi politik menjadi sangat penting, karena itu interaksi dan komunikasi politik merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dicermati dalam setiap sistem politik (Pureklolon, 2016). Melalui interaksi dan komunikasi politik kemasyarakatan seperti Muslimat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Qibtiyah, 2017).

Dengan kaitannya dalam Pilkada Serentak Kab. Ponorogo Tahun 2020, Muslimat juga melakukan interaksi serta komunikasi dengan pasangan calon. Muslimat menerima kedatangan para calon Bupati dan Wakil Bupati yang menawarkan berbagai program-program yang melibatkan masyarakat khususnya perempuan. Melalui interaksi ini, organisasi Muslimat memberikan ruang para anggotanya untuk mengetahui pentingnya berpolitik secara luas. Adanya sebuah kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan kepentingan masyarakat membuat para anggota Muslimat ikut terlibat

dalam menjaga kualitas Muslimat dalam memegang tujuan utamanya yang mengedepankan urusan kemasyarakatan (Wawancara Bendahara Ranting Muslimat Desa Kemuning, 4 Agustus 2021).

Melalui media seminar, sosialisasi, pertemuan rutin seperti pengajian, arisan maupun yang lainnya, Muslimat berupaya membangun interaksi dan komunikasi politik dengan pasangan calon baik pasangan 01 maupun 02 sebagai bagian dari pendidikan politik bagi anggotanya. Bentuk pendidikan politiknya berupa mengembangkan wawasan mengenai berpolitik dengan benar seperti hak dipilih dan memilih, hak keterlibatan politik dalam penyelenggaraan Pilkada, kewajiban dalam melaksanakan kontrol penyelenggaraan Pilkada, serta memberikan edukasi tentang bahayanya memilih pemimpin berdasarkan uang yang didapat. Hal ini dilakukan Muslimat agar anggota Muslimat mampu berfikir kritis dalam proses penyelenggaraan Pilkada dengan benar (Wawancara Ketua PAC Muslimat Sawoo, 4 Agustus 2021).

Kedua, keterlibatan Muslimat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020. Bentuk keterlibatan ini dibuktikan dengan adanya anggota Muslimat yang turut menjadi tim sukses pemenangan cabup dan wakilnya, pengawas, petugas KPPS dan saksi

(Wawancara Bendahara Ranting Kel. Mangkujayan, 2 Agustus 2021). Peran Muslimat sebagai organisasi perempuan disini adalah mendukung anggotanya dalam melakukan peran tersebut dan Muslimat juga membebaskan pilihan para anggotanya untuk memberikan dukungan pada paslon manapun (Wawancara Ketua PAC Muslimat Sawoo, 4 Agustus 2021). Jadi dalam hal ini, organisasi Muslimat bersifat netral atau tidak memaksa anggotanya untuk mendukung salah satu calon, hal yang sama ditegaskan oleh Ketua Umum Muslimat Pusat (Kofifah Indar Parawansa) yang menyatakan bahwa organisasi Muslimat dilarang memihak pada salah satu paslon dalam Pilkada, tetapi anggota Muslimat boleh memberikan dukungannya secara individu untuk memilih salah satu calon karena kewajiban sebagai warga negara (media.indonesia.com).

Selain itu Muslimat juga membantu KPU dan Bawaslu dalam melakukan sosialisasi melalui pertemuan rutin dan sosialisasi online grup whatsapp, muslimat selalu memberi arahan kepada anggotanya agar dapat melaksanakan Pilkada yang demokratis. Yang dilakukan Muslimat disini adalah mengajak para anggotanya untuk datang ke TPS dan menyuarakan hak suara mereka dalam Pilkada yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020, sosialisasi tentang

bahaya politik uang serta gerakan anti golput. Oleh karena itu Muslimat berpartisipasi aktif dalam mendukung dan mendorong masyarakat melalui berbagai kegiatan dan programnya untuk membantu mensukseskan Pilkada Serentak Kab. Ponorogo Tahun 2020 guna mewujudkan demokrasi Pilkada secara substansif.

2. Kontrol Politik Muslimat

Pilkada Serentak tahun 2020 merupakan ajang pembuktian yang dilakukan oleh muslimat dan anggotanya dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dengan tujuan demokrasi dapat berjalan lancar, mengutip dari Robert A Dahl bahwa demokrasi dapat berjalan lancar terdapat indikator yang menjadi ukuran salah satunya *final control of agenda* artinya pemilu di anggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol serta mengawasi jalannya pemilu (Nasrudin, 2019). Kontrol politik merupakan serangkaian kegiatan untuk mengurai problematika, menunjukkan kesalahan, kecacatan atau bahkan celah penyimpangan terlebih lagi di dalam suatu rumusan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh pihak pemerintah (Amin, 2015).

Bentuk kontrol politik yang dilakukan oleh Muslimat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten

Ponorogo berupa serangkaian usaha dalam mengawasi jalannya proses pemilihan kepala daerah mulai dari tingkat desa hingga kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU. Dalam hal ini Muslimat berperan sebagai pengawas independen membantu lembaga negara yang berkewenangan mengawasi jalannya Pemilu yaitu Bawaslu.

Fenomena politik uang yang selalu menyertai penyelenggaraan Pemilu menjadi perhatian penting bagi Muslimat sebagai bagian dari kontrol terhadap penyelenggaraan Pemilu terutama terkait dengan pasangan calon dan partai-partai pendukungnya. Muslimat menegaskan kepada anggotanya tentang politik uang dilakukan oleh paslon ataupun partai pengusung itu tidak benar. Politik uang mengakibatkan pada tingginya biaya dalam pemilihan kepala daerah yang harus ditanggung oleh calon dan partai pengusung. Politik uang juga berdampak pada kualitas, misal adanya beberapa program yang tidak jalan, pembangunan yang tidak efisien, serta munculnya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, Muslimat tidak menyetujui dengan adanya politik uang di Pilkada 2020 ini. Politik uang merupakan sebuah budaya yang sangat kental dan turun-temurun didalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai organisasi yang besar, Muslimat berperan

untuk memberi pendidikan kepada anggotanya dan mengajak melakukan berpolitik secara sehat dengan memikirkan arah serta nasib pemerintahan 5 tahun kedepan (Wawancara Ketua PAC Muslimat Sawoo, 4 Agustus 2021). Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Umi Azizah, Ketua PC Muslimat Kab. Tegal yang menyatakan bahwa politik uang merupakan cara berpolitik dengan cara tidak terpuji dan harus dihindari (Nurhastuti, 2019).

Melalui beberapa anggota Muslimat yang turut menjadi tim pemenangan, dan saksi, Muslimat berusaha mencari informasi ditingkat desa hingga kabupaten tentang pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Ponorogo. Tidak hanya itu, Muslimat juga mengikuti perkembangan terbaru via media digital (internet, TV, radio) yang dilakukan oleh KPU terkait dengan pelaksanaan Pilkada hingga tahap penetapan pemenang. Muslimat tidak pernah melakukan bentuk protes kepada pihak-pihak tersebut karena Muslimat meyakini jika KPU dan Bawaslu sudah melaksanakan pekerjaannya dan bersifat netral atau tidak curang dan tidak memihak salah satu paslon (Wawancara Ketua PAC Muslimat Sawoo).

Opini ini juga diperkuat melalui wawancara dengan Ibu Tita yang merupakan anggota Muslimat dan sekaligus menjadi

saksi dalam proses perhitungan suara di salah satu TPS, beliau mengatakan bahwa tugas seorang saksi adalah mengawasi proses perhitungan suara mulai dari TPS hingga ke KPU Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilalukan untuk melihat bahwa tidak ada unsur kecurangan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian secara langsung tugas saksi juga membantu lembaga Bawaslu dalam mengawasi jalannya proses perhitungan suara (wawancara, 2 Agustus 2021).

KESIMPULAN

Momentum Pilkada merupakan sarana masyarakat dalam menentukan pemimpin yang diyakini secara bebas dan langsung. Usaha Muslimat dalam menegakkan politik representasi di Pilkada Serentak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 terlihat dari perjuangan atas keterwakilan politik serta kontrol politik yang dilakukannya. Gerakan Muslimat dengan bebas dapat memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang setara dengan kaum laki-laki sebagai warga negara.

Perjuangan atas keterwakilan politik Muslimat dalam Pilkada serentak tahun 2020 dapat dilihat dengan 2 indikator yaitu interaksi dan komunikasi politik serta keterlibatan Muslimat dalam Pilkada Serentak. Bentuk interaksi dan komunikasi

politik Muslimat dengan pasangan calon dan partai pendukung menjadi sarana pendidikan politik yang di manfaatkan oleh Muslimat untuk memperjuangkan hak-hak politik anggotanya sebagai warga negara. Dalam kesempatan tersebut organisasi muslimat berusaha menyampaikan aspirasinya berupa program-program social kemasyarakatan yang memberi ruang dan peran terhadap perempuan kepada para pasangan calon maupun partai pendukung. Disamping itu, keterwakilan politik muslimat ditunjukkan melalui keterlibatannya dalam Pilkada Serentak baik melalui para anggotanya yang menjadi tim sukses atau tim pemenangan pasangan calon, menjadi pengawas, petugas KPPS dan saksi.

Selain keterwakilan politik dalam konteks politik representasi Muslimat juga mengambil peran dalam mengontrol dan mengawasi jalannya Pilkada Serentak Tahun 2020. Bentuk kontrol politik Muslimat sendiri adalah usaha mereka dalam mengawasi jalannya proses penyelenggaraan Pilkada mulai dari tahap awal hingga akhir (penetapan pemenang). Salah satu yang menjadi perhatian Muslimat didalam mengontrol jalannya Pilkada Serentak adalah melawan fenomena politik uang yang selalu muncul pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Dengan cara memberikan edukasi kepada

seluruh anggotanya untuk menolak praktik politik uang yang dilakukan oleh paslon maupun partai pendukungnya. Upaya muslimat untuk mengontrol jalannya pemilu sudah dilakukan melalui para anggotanya yang terlibat secara aktif dalam pemilu baik sebagai tim sukses, pengawas, KPPS, maupun saksi untuk melaporkan hal-hal terbaru terkait dengan pilkada serentak. Selain itu muslimat juga memanfaatkan media digital seperti media sosial, internet, televisi dan radio dalam rangka mengedukasi masyarakat atas bahaya politik uang sebagai bagian kontrol dari Pilkada Serentak.

REFERENCES

- Adhim, F. F. (2018). Kinerja Muslimat NU Jawa Timur dalam Strategi Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa–Emil Elestianto Dardak pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- Akbar, I. (2016). Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 95–110.
- Amin, H. M. E. (2015). PERGESERAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 13–25.
- Dewa, N. B. S., Sulton, S., & ... (2020). Perjuangan Kaum Disabilitas Dalam

- Mendapatkan Identitas Kewargaan. *Civic-Culture: Jurnal ...*, 4(2), 1–14.
<http://publikasi.stkippgri-bkl.ac.id/index.php/CC/article/view/422>
- Hiariej, E. dan Kristian, S. (2018). *Politik Kewargaan di Indonesia*. MediaIndonesia. (2020). *Khofifah Larang Muslimat Dukung Paslon dalam Pilkada*. Dipetik 5 Agustus 2021, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/356732/khofifah-larang-muslimat-dukung-paslon-dalam-pilkada>
- Nasrudin, J. (2019). *Politik Identitas dan Representasi Politik*. 1, 34–47.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(2), 173–181.
- Nurhastuti. (2019). *POLITIK PEREMPUAN DI TINGKAT LOKAL (Studi Peran Muslimat dan Fatayat NU dalam Mobilisasi Suara Pada Pilkada 2018 di Kabupaten Tegal)*.
- Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Qibtiyah, A. (2017). *Komunikasi Politik Muslimat NU dalam Sukses Pemilihan Umum Kepala*. 1(September), 1–16.
- Sulton (2015). *Pemilu dan Kepemimpinan Nasional*. Ponorogo: Wade Group.
- Syukriyah, L. (2016). *Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia (1946-1955)*. *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 609–620.
- Zainal, A. A. (2018). *Perempuan NU dan Pilkada (Studi Terhadap Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat NU Terhadap Pasangan Indah Putri Indriani-Thahar Rum Di Pilkada Serentak Tahun 2015)*. In *Biomass Chem Eng* (Vol. 3, Issue 2).